

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara geografis, Lempeng Benua Asia, Benua Australia, Lempeng Samudera Hindia, dan Samudera Pasifik bertemu membentuk suatu kepulauan Indonesia. Terdapat sabuk vulkanik (*volcanic arc*) yang membentang dari Sumatra, Jawa, Nusa Tenggara, dan Sulawesi di wilayah selatan dan timur Indonesia. Dataran rendah di kedua sisinya sebagian terdiri dari lahan basah atau disebut dengan rawa-rawa dan juga pegunungan vulkanik tua. Kondisi ini membuat bencana seperti tanah longsor, gempa bumi, tsunami, banjir, dan letusan gunung berapi sangat mungkin untuk terjadi¹. Dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan, baik oleh faktor manusia, alam, maupun faktor lainnya yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan harta benda, kerusakan lingkungan, dan dampak psikologis².

Berdasarkan kajian dari BNPB, jika melihat jumlah kejadian bencana per bulan di Indonesia dapat dilihat bahwa pada awal tahun 2023 yaitu pada bulan Januari, Februari, dan Maret, tercatat banyak kejadian bencana yang sebagian besar disebabkan oleh banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem. Mulai bulan April

¹ Dokumen Data Bencana Indonesia Tahun 2023

² Shufi Soenarto Putri, dkk. 2021. Manajemen Strategi BPBD dalam Penanggulangan Banjir Di Kabupaten Bekasi. Jurnal Administrasi Publik. Vol. 9. No.2

dan seterusnya, terjadi penurunan jumlah kejadian bencana, namun kembali meningkat hingga bulan November dan Desember. Karena curah hujan yang tinggi selama musim hujan, yang menyebabkan banyak tempat mengalami banjir, cuaca buruk, dan tanah longsor, terlihat bahwa bencana hidrometeorologi basah mendominasi pada bulan Januari hingga Maret serta pada bulan November dan Desember³. Selain itu, tingginya intensitas curah hujan yang mencapai 200-300 mm/bulan selama musim hujan semakin memperparah kondisi ini. Banjir tidak hanya mengakibatkan kerusakan infrastruktur, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi, sosial, dan bahkan korban jiwa⁴.

Kejadian bencana yang paling sering terjadi di Indonesia khususnya di Tahun 2023 adalah kebakaran hutan dan lahan (2.051), diikuti oleh cuaca ekstrem (1.261), banjir (1.255), tanah longsor (951), kekeringan (174), gelombang pasang/abrasi (33), gempa bumi (31), dan letusan gunung berapi (4). Namun, dalam hal jumlah korban jiwa dan hilangnya nyawa yang disebabkan mencapai 144 orang akibat tanah longsor dan menduduki peringkat pertama sebagai bencana alam yang paling mematikan. Banjir berada di urutan kedua dengan 92 kematian dan 28 orang hilang, diikuti oleh cuaca ekstrem dengan 28 kematian dan 23 orang hilang, letusan gunung berapi dengan 23 kematian, kekeringan dengan 6 kematian, dan gempa bumi dengan 6 kematian⁵.

Salah satu bencana yang sering melanda Indonesia hampir setiap tahun adalah banjir. Curah hujan yang tinggi dikombinasikan dengan topografi

³ Dokumen Data Bencana Indonesia Tahun 2023. *Op.Cit.*Hlm 3

⁴ BMKG. 2023. Data Curah Hujan Kota Padang

⁵ Dokumen Data Bencana Indonesia Tahun 2023. *Op.Cit.*Hlm 7

Indonesia yang berbukit-bukit dan berpuncak-puncak, serta kerentanan negara ini terhadap pembangunan yang tidak menentu dan perubahan lingkungan, merupakan penyebab utama terjadinya banjir. Meningkatnya urbanisasi, penggundulan hutan, dan perencanaan tata ruang pembangunan infrastruktur yang tidak memadai, telah menyebabkan memburuknya kondisi banjir di beberapa daerah. Akibatnya, sekarang ada lebih banyak permukaan yang tidak menyerap air, lebih sedikit daerah resapan, dan saluran air yang tersumbat membuat air hujan lebih sulit untuk diserap dan menyebabkan air hujan langsung mengalir ke permukaan sehingga menyebabkan banjir yang sering merusak infrastruktur lokal dan mengganggu kehidupan penduduk.

Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang rentan terhadap bencana dan memiliki indeks risiko bencana yang tinggi. Sumatera Barat memiliki berbagai macam bencana alam yang rumit selain banjir, yaitu tanah longsor, gempa bumi, tsunami, kebakaran, abrasi, dan angin kencang. Hal ini mungkin disebabkan oleh lempeng bumi yang bergerak memanjang di sepanjang pantai barat Sumatera, serta fakta bahwa ada empat segmen patahan bumi yang aktif di Sumatera Barat yaitu segmen Sianok, Suliki, Sumani, dan Sumpur. Segmen-segmen ini berpotensi menyebabkan gempa bumi di wilayah Bukit Barisan yang membentang di Sumatera Barat⁶. Berikut ini adalah potensi bencana banjir di Sumatera Barat pada tahun 2020-2023

⁶ Dokumen Rencana Kontinjensi Menghadapi Bencana Tsunami Provinsi Sumatera Barat

Tabel 1. 1

Potensi Bencana Banjir di Sumatera Barat 2020-2023

No.	Wilayah	2020	2021	2022	2023	Potensi Bencana
1.	Padang Pariaman	209.20	193.52	193.52	204.32	Tinggi
2.	Pasaman Barat	203.20	203.20	203.20	203.20	Tinggi
3.	Pasaman	197.20	197.20	197.20	184.08	Tinggi
4.	Kepulauan Mentawai	189.60	169.42	152.96	162.58	Tinggi
5.	Lima Puluh Kota	178.00	176.80	176.80	177.50	Tinggi
6.	Kota Pariaman	171.20	171.20	157.28	146.81	Tinggi
7.	Kota Padang	169.92	181.70	179.03	166.99	Tinggi
8.	Tanah Datar	167.21	156.73	156.73	161.48	Tinggi
9.	Solok Selatan	143.20	137.69	137.69	141.50	Sedang
10.	Pesisir Selatan	137.20	137.20	137.20	137.20	Sedang
11.	Dharmasraya	137.20	137.20	137.20	130.03	Sedang
12.	Kota Bukittinggi	130.00	130.00	128.01	128.61	Sedang
13.	Sijunjung	125.20	125.20	125.20	125.20	Sedang
14.	Kota Solok	125.20	125.20	115.82	121.93	Sedang
15.	Agam	119.20	119.20	119.20	119.20	Sedang
16.	Kota Padang Panjang	113.20	113.20	113.20	113.20	Sedang
17.	Kota Sawah Lunto	113.20	113.20	101.08	107.47	Sedang
18.	Solok	107.20	107.20	107.20	107.20	Sedang
19.	Kota Payakumbuh	104.80	104.80	104.80	104.80	Sedang
Indeks Risiko Bencana Provinsi Sumatera Barat 2023		149,50	147,40	144,40	144,40	Tinggi
		146,43				

Sumber : Indeks risiko Bencana Indonesia Direktorat Pengurangan Risiko Bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Tahun 2023

Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan bahwa indeks risiko bencana banjir pada setiap daerah di Provinsi Sumatera Barat tergolong sedang-tinggi, dari 19 kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat, 11 kabupaten dan kota mempunyai peringkat risiko bencana banjir sedang, dan 8 kabupaten dan kota memiliki indeks risiko bencana banjir tinggi termasuk Kota Padang. Berdasarkan hal tersebut, Kota Padang menjadi daerah yang rawan terhadap bencana alam banjir. Hal ini disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan aktivitas manusia

seperti menebang pohon secara tidak bertanggung jawab serta membuang sampah ke sungai. Selain itu, ketidakmampuan sungai dan sistem drainase dalam menangani volume air yang jatuh saat hujan deras juga berpotensi mengakibatkan terjadinya bencana banjir⁷.

Wilayah yang memiliki potensi bencana banjir yang tinggi di Provinsi Sumatera Barat salah satunya adalah Kota Padang, hal tersebut dikarenakan wilayah Kota Padang secara topografi dialiri beberapa aliran sungai. Aliran sungai yang berada di tengah pemukiman masyarakat Kota Padang ini, tentunya membawa dampak terhadap kondisi lingkungan hidup, terkhususnya lingkungan hidup sungai. Dampak terhadap kondisi sungai yang dimaksud adalah karena sungai yang berada di tengah pemukiman penduduk biasanya berpotensi terhadap masalah banjir yang diakibatkan dari kegiatan manusia yang berada di sekitarnya⁸. Adapun rekapitan catatan sejarah kebencanaan Kota Padang kurun waktu dari 2020 sampai 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.2
Sejarah Kebencanaan Kota Padang Tahun 2020-2023

Kejadian	2020	2021	2022	2023	Total
Kebakaran	6	0	0	0	6
Banjir	14	24	12	36	86
Tanah Longsor	17	11	19	38	85
Angin Badai	7	1	6	10	24

Sumber: data rekapitulasi kejadian bencana tahunan BPBD Kota Padang

⁷ Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kota Padang Tahun 2025-2029, hlm 42

⁸ *Ibid*

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 4 tahun terakhir terkait kejadian bencana di Kota Padang, dapat disimpulkan bahwa banjir merupakan kejadian yang paling banyak terjadi dibandingkan dengan bencana lainnya yaitu 86 kali. Hal ini menekankan betapa pentingnya bagi pemerintah dan masyarakat Kota Padang untuk selalu waspada dan siap siaga terhadap kejadian bencana banjir yang dapat terjadi kapan saja untuk mengurangi risiko dan kerugian yang terkait dengan bencana banjir.

Berdasarkan sejarah kebencanaan di Kota Padang, bencana banjir yang terjadi di tahun 2023 lalu merupakan banjir terparah sejak tahun 2016. Hal ini terlihat dari ratusan rumah yang terendam banjir dengan ketinggian air di pekarangan rumah sekitar seleher atau 1,5 meter dan di dalam rumah mencapai setinggi pinggang atau 80–90 cm, meskipun sudah disediakan perahu karet, namun Ekos Albar selaku wakil wali kota padang menyebutkan bahwa belum adanya tenda darurat yang didirikan sehingga bagi warga yang ingin mengungsi di alihkan ke rumah dinas wakil wali kota Padang. Selain itu, ada 7 (tujuh) rumah di Kecamatan Padang Selatan yang mengalami kerusakan berat dan sedang akibat longsor, serta meninggalnya dua balita akibat bencana tersebut⁹.

Begitu juga dengan banjir yang melanda Kota Padang pada tanggal 7 Maret 2024 juga terbilang cukup parah karena menyebabkan akses jalan Padang-Solok lumpuh akibat longsor, sedangkan sekitar 8.118 warga masih terdampak banjir dan masyarakat yang mengungsi berjumlah 2.947 orang. Selain itu, ada

⁹ Kompas.com, di akses pada 20 Februari 2024, 12.41 WIB. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/07/14/hujan-deras-sejak-kemarin-kota-padang-dilanda-banjir-dan-longsor>

delapan (8) kecamatan yang terendam banjir (Kecamatan Lubuk Begalung, Lubuk Kilangan, Pauh, Koto Tangah, Padang Utara, Kuranji, Naggalo dan Padang Selatan) dengan ketinggian permukaan air yang bervariasi hingga 1,5 meter. Kejadian ini mengakibatkan beberapa kerugian, BPBD mencatat kerusakan pada 110 unit rumah warga dan 1 RSUP dr. M. Djamil Padang, sedangkan 2 rumah dinyatakan hanyut akibat banjir¹⁰. Berikut pada gambar 1.1 terlihat bencana banjir yang terjadi di Kota Padang.

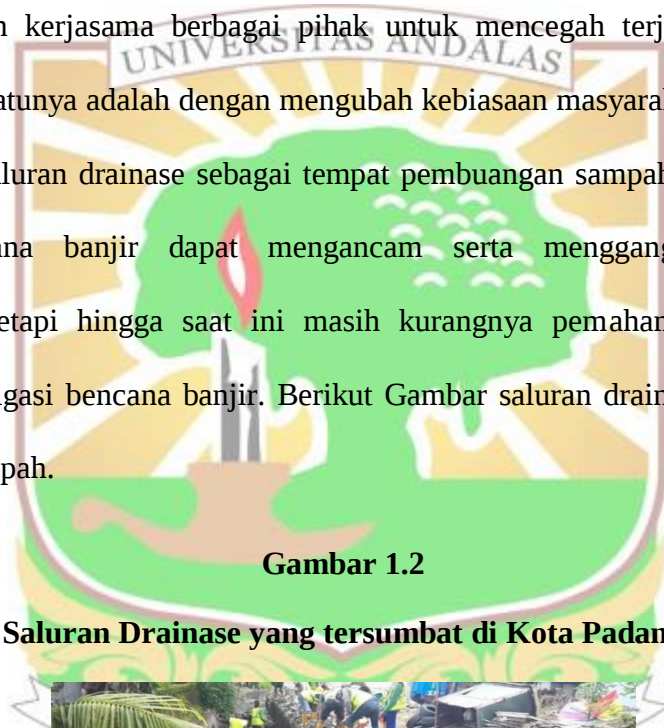


Terlihat dari kasus-kasus tersebut, maka diperlukan adanya mitigasi bencana agar dapat mengurangi resiko dan cepat tanggap saat terjadinya banjir. Bencana banjir ini terjadi akibat drainase yang belum optimal, pembuangan sampah sembarangan, serta akibat fenomena alam seperti curah hujan. Hal ini disampaikan oleh Rezko selaku staf Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang ketika survei awal penelitian dilakukan, beliau menyatakan bahwa:

¹⁰ Sindonews, di akses pada 20 Februari 2024, 12.41 WIB.
<https://daerah.sindonews.com/read/1336997/174/update-banjir-padang-8118-warga-terdampak-2-rumah-hanyut-1709964216>

“Sumber permasalahan banjir di Kota Padang ini sudah diketahui yaitu buruknya sistem drainase yang ada, kapasitas jaringan drainase yang tidak memadai, penyumbatan saluran air oleh pipa PDAM, sampah, dan sebagainya. Untuk mengatasi permasalahan ini BPBD Kota Padang telah berkoordinasi dengan pihak PUPR maupun DLH untuk menyelesaikan penyebab masalah banjir ini” (wawancara dengan bapak Rezko Yunanda selaku staf Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang pada 06/05/2024, pukul 14.20 WIB).

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut terlihat bahwa masalah penanggulangan bencana banjir ini terlihat semakin berat. Untuk itu, dibutuhkan komitmen dan kerjasama berbagai pihak untuk mencegah terjadinya bencana banjir, salah satunya adalah dengan mengubah kebiasaan masyarakat supaya tidak menjadikan saluran drainase sebagai tempat pembuangan sampah. Perlu disadari bahwa bencana banjir dapat mengancam serta mengganggu kehidupan masyarakat, tetapi hingga saat ini masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai mitigasi bencana banjir. Berikut Gambar saluran drainase yang masih tersumbat sampah.



Gambar 1.2

Saluran Drainase yang tersumbat di Kota Padang

Sumber: DLH Kota Padang

Terlihat dari Gambar 1.2 bahwa masih ada di daerah Kota Padang yang memiliki saluran drainase dengan kondisi penuh dengan sampah. Oleh karena itu, pencegahan banjir sudah pasti dibutuhkan oleh masyarakat sekitar karena dampak

banjir terhadap masyarakat tidak hanya berupa kerugian harta benda dan bangunan, tetapi juga mempengaruhi perekonomian masyarakat dan kesehatan. Untuk itu, diharapkan kepada pemerintah agar tanggap memperbaiki kerusakan serta dibutuhkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan dengan cara tidak membuang sampah sembarangan terutama di saluran drainase.

Kota Padang merupakan wilayah yang rentan terhadap bencana, baik bencana alam maupun non-alam. Bencana alam seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor serta angin badai sudah menjadi bencana tahunan yang sering terjadi pada setiap Kecamatan di Kota Padang. Sebagaimana yang disampaikan oleh seksi Kesiapsiagaan BPBD Kota Padang berikut:

“Kota Padang merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi bencana yang tinggi di Sumatera Barat, dalam hal ini tentu pihak BPBD Kota Padang yang berperan sebagai *leading sector* penanggulangan bencana di Kota Padang dituntut agar selalu siap dan siaga dalam menghadapi bencana yang akan terjadi dan melaksanakan upaya-upaya dalam penanggulangan bencana agar dapat mengurangi dampak dari risiko bencana” (Wawancara dengan bapak Djuliusrin, SH, selaku seksi Kesiapsiagaan BPBD Kota Padang pada 17 Oktober 2024 Pukul 10.25 WIB).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Kota Padang merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi bencana yang tinggi di Sumatera Barat, BPBD Kota Padang sebagai *leading sector* penanggulangan bencana di Kota Padang dituntut agar selalu siap dan siaga dalam menghadapi bencana yang akan terjadi dan melaksanakan upaya-upaya dalam penanggulangan bencana agar dapat mengurangi dampak dari risiko bencana.

Dengan demikian, pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di setiap Kabupaten dan Kota di Sumbar, pembentukan Komunitas Siaga

Bencana dan Kelurahan Tangguh Bencana di setiap wilayah Kota Padang, melakukan program sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat umum, serta mengetahui wilayah yang rawan banjir, merupakan sebuah upaya beberapa strategi yang digunakan untuk meningkatkan kesiapsiagaan kawasan terhadap ancaman. Berikut wilayah yang rentan terkena banjir di Kota Padang:

Tabel 1.3

Potensi Bahaya Banjir di Kota Padang

No.	Kecamatan	Bahaya				
		Luas Bahaya (Ha)				Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
1.	Bungus Teluk Kabung	13,95	1.134,18	309,06	1.457,19	Sedang
2.	Koto Tangah	128,34	3.313,75	1.608,99	5.051,08	Sedang
3.	Kuranji	37,44	1.298,34	480,96	1.816,74	Sedang
4.	Lubuk Begalung	18,45	956,07	139,68	1.114,20	Tinggi
5.	Lubuk Kilangan	0	406,53	169,65	576,18	Sedang
6.	Nanggalo	29,61	416,78	170,69	617,08	Sedang
7.	Padang Barat	15,48	308,90	56,94	381,32	Sedang
8.	Padang Selatan	14,17	257,05	108,87	380,09	Tinggi
9.	Padang Timur	39,33	475,97	36,31	551,61	Sedang
10.	Padang Utara	55,68	476,49	74,52	606,69	Sedang
11.	Pauh	0	662,58	383,58	1.046,16	Tinggi
	Kota Padang	352,45	9.706,64	3.539,25	13.598,34	Tinggi

Sumber: Dokumentasi KRB BPBD Kota Padang 2022

Tabel 1.3 menunjukkan bahwa Kota Padang memiliki total luas 13.598,34 Ha yang berada di bawah risiko banjir, menempatkannya di kelas Tinggi. Wilayah bahaya banjir dibagi menjadi tiga kelas: 352,42 Ha untuk kelas rendah, 9.706,64 Ha untuk kelas menengah, dan 3.539,25 Ha untuk kelas tinggi. Terdapat tiga kecamatan yang mempunyai potensi bahaya banjir yang tinggi, hal ini dapat dihitung dari jumlah rata-rata kejadian banjir yang terjadi di setiap kecamatan. Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa kecamatan Lubuk Begalung, Padang

Selatan, dan Pauh merupakan wilayah yang memiliki potensi bahaya banjir yang tinggi. Untuk itu, penting bagi pemerintah bersama BPBD Kota Padang untuk melaksanakan penanggulangan yang serius terutama saat pra bencana untuk mengurangi resiko terhadap terjadinya bencana banjir di Kota Padang.

Mitigasi atau pengurangan risiko bencana masih menjadi prioritas dalam penanggulangan bencana, yang berarti upaya pencegahan, kesiapsiagaan, peningkatan kapasitas sumber daya, sosialisasi, dan kegiatan pra-bencana lainnya diutamakan dalam penanggulangan bencana. Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penanggulangan bencana di Indonesia baik sebelum, saat, dan setelah terjadinya bencana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana memiliki tiga fungsi utama, yaitu komando, koordinasi, dan pelaksana dalam menjalankan mandatnya. Ketiga fungsi ini menjadi landasan operasi penanggulangan bencana yang cepat, akurat, dan terukur oleh BNPB. Sebagai organisasi daerah yang berwenang untuk melaksanakan penanggulangan bencana di daerah, BNPB berkolaborasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam pelaksanaannya¹¹.

Oleh karena itu, dituliskan dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi & Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang bahwa diperlukannya suatu badan atau lembaga yang bertugas untuk menanggulangi bencana yaitu BPBD. Pembentukan BPBD diharapkan bisa melakukan suatu manajemen strategi dalam mitigasi bencana

¹¹ Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kota Padang Tahun 2025-2029. *Op.Cit.* hlm 71

banjir sehingga dapat mencegah terjadinya bencana dan meminimalisir kerugian saat terjadinya banjir khususnya dalam meminimalisir jumlah korban jiwa. Selain itu, peneliti juga berasumsi bahwa suatu organisasi memerlukan adanya sebuah manajemen strategi yang efektif dalam merumuskan, melaksanakan, serta, mengevaluasi strategi yang digunakan BPBD Kota Padang sebagai *leading sector* dalam pelaksanaan mitigasi bencana banjir ini.

Manajemen strategi digunakan untuk menganalisis lingkungan, merumuskan strategi dalam pencegahan yang dilakukan, melaksanakan serta mengevaluasi strategi yang telah dilakukan untuk memenuhi tujuan sebuah organisasi. Dalam mengkaji proses manajemen strategi yang dilakukan oleh BPBD dalam mitigasi bencana banjir di Kota Padang, peneliti menggunakan Renstra BPBD Kota Padang tahun 2019-2024 sebagai acuan. Hal ini dikarenakan Renstra tersebut memberikan kerangka dasar untuk merencanakan tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan oleh aparatur BPBD Kota Padang sebagai *leading sector* penanggulangan bencana di Kota Padang. Selain itu, Renstra ini juga berfungsi sebagai titik awal untuk mengevaluasi tindakan manajemen yang dilakukan di dalam BPBD Kota Padang.

Dengan demikian, untuk melihat proses manajemen strategi yang dilakukan oleh BPBD Kota Padang dalam mitigasi bencana banjir peneliti menggunakan teori manajemen strategi menurut J. David Hunger dan Thomas L. Wheelen. Dalam hal ini, J. David Hunger dan Thomas L. Wheelen mendefinisikan bahwa manajemen strategi merupakan sekumpulan keputusan dan aktivitas manajerial yang mempengaruhi kinerja organisasi dalam jangka waktu

yang panjang. Proses pemindaian lingkungan, perumusan strategi yang melibatkan perencanaan jangka panjang, implementasi strategi dan juga evaluasi strategi adalah semua hal yang termasuk dalam proses manajemen strategi.

Konsep pertama yang dikemukakan oleh J. David Hunger dan Thomas L. Wheelen dalam proses manajemen strategi adalah pemindaian lingkungan yang terdiri dari dua indikator yaitu secara internal maupun eksternal. Dari segi internal, pemindaian lingkungan dapat dilihat dari sumber daya organisasi yang dimiliki oleh BPBD Kota Padang. Sumber daya organisasi menjadi faktor penting dalam proses pemindaian lingkungan yang meliputi sarana prasarana, keuangan, dan sumber daya manusia. Untuk mengimplementasikan upaya pengurangan risiko bencana banjir secara efektif di Kota Padang dan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, sangat penting untuk memiliki sumber daya manusia yang memiliki keterampilan baik dalam menangani bencana secara efektif.

Berdasarkan data yang peneliti temukan, BPBD Kota Padang memiliki sumber daya manusia yang berjumlah 62 orang termasuk Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang. Namun dalam menjalankan kegiatan dalam proses mitigasi bencana, sumber daya manusia yang berjumlah 62 orang tersebut masih dinilai kurang secara kuantitas maupun kualitas. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kasubag Umum BPBD Kota Padang sebagai berikut:

“Untuk menanggulangi bencana banjir di Kota Padang dengan jumlah sumber daya yang sudah ada memang kami sebenarnya kekurangan SDM. Kalau untuk tahap mitigasi, selain kekurangan SDM secara kuantitas jika dilihat secara kualitas kami juga merasa sangat kurang. Contohnya saja jika kami mengirimkan sepuluh orang untuk melakukan pelatihan ataupun sosialisasi, yang turun lapangan hanya lima atau enam orang saja”

(wawancara dengan Kasubag Umum Alfa Harryoga Darwin, S.STP., M.A.P pada 11/11/2024, pukul 11.35 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa masih kurangnya sumber daya manusia secara kualitas yang dimiliki oleh BPBD dalam tahap mitigasi bencana banjir yang terjadi di Kota Padang. Dengan demikian, sumber daya manusia merupakan modal yang sangat penting untuk menentukan perkembangan organisasi ke arah yang lebih baik. Selain itu, kurangnya pelatihan yang dilakukan oleh BPBD Kota Padang terhadap sumber daya aparaturnya juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan bencana di Kota Padang.

Selanjutnya fenomena dalam proses pemindaian lingkungan secara eksternal dapat dilihat dari peluang maupun ancaman yang dimiliki oleh BPBD Kota Padang. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Padang sebagai berikut:

“Peluang yang dimiliki BPBD Kota Padang adalah kami dari pemerintah sudah cukup tinggi dalam menanggulangi masalah banjir, namun memang kesadaran masyarakat yang masih rendah bahkan kami sudah melakukan sosialisasi agar selalu membuang sampah jangan di sungai, jangan membakar sampah apalagi di bawah pohon, tapi tetap dilakukan meskipun sudah diberi aturan dari DLH hingga diberi denda bagi siapa saja yang melanggar aturan namun masyarakat masih mengabaikan hal tersebut. Sedangkan dari segi ancaman, banjir besar yang kemarin itu memang disebabkan oleh intensitas curah hujan yang harusnya turun dalam waktu satu bulan tapi turun dalam satu hari sehingga bisa dikatakan tergolong sangat tinggi. Oleh karena itu, meskipun disini tidak hujan tapi di bagian hulu hujan lebat maka daerah tabing dan banda gadang tetap akan terjadi banjir karena daerah resapan di daerah atas sudah tidak ada lagi. Istilahnya pembangunan di daerah atas sudah mulai bergerak dan mungkin developer tidak memperhatikan yang namanya resapan air”. (Wawancara dengan

bapak Deni Harzandy, S.Sos selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Padang pada 15/10/2024, pukul 13.40 WIB).

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut, pihak BPBD beserta pemerintah setempat memiliki peluang dalam menangani bencana yang akan terjadi, namun masih diperlukannya partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam menanggulangi bencana salah satunya banjir agar kegiatan yang sudah direncanakan dapat terealisasi dengan baik. Sedangkan dari segi hal ancaman, BPBD Kota Padang memiliki ancaman seperti tingginya curah hujan serta minimnya resapan air yang disediakan sehingga hal ini menyulitkan pemerintah dalam menanggulangi bencana banjir yang terjadi di Kota Padang.

Proses perumusan strategi juga berdampak pada proses manajemen strategis. Pemerintah daerah sekarang memiliki kekuatan untuk menjamin manajemen bencana yang kompeten dan efisien, mulai dari sebelum bencana terjadi dan terus berlanjut hingga setelah bencana terjadi, berkat pengesahan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007. Tujuan dari mitigasi bencana adalah untuk mengurangi kemungkinan terjadinya bahaya untuk meningkatkan keselamatan. Risiko bencana dapat diminimalisir dengan meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan sejak dini saat sebelum bencana terjadi. Hal ini dapat dicapai dengan cara pemerintah mengedukasi dan mensosialisasikan kepada masyarakat tentang kebencanaan.

BPBD Kota Padang diberi tugas oleh Pemerintah Daerah Kota Padang dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah yang berkaitan dengan penanggulangan bencana, sehingga hal ini akan berdampak pada tingkat

keamanan dan ketentraman masyarakat. Selain itu, diperlukannya juga tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) agar bisa mengoptimalkan tercapainya tujuan BPBD Kota Padang yang diatur dalam peraturan Wali Kota Padang Nomor 71 Tahun 2022 tentang kedudukan, tugas, fungsi, serta tata kerja BPBD dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota Padang, maka BPBD Kota Padang menetapkan tujuan organisasi yang ingin dicapai. Supaya berhasil dalam penanggulangan bencana di Kota Padang, perlu adanya strategi yang mumpuni serta pedoman tugas pokok dan fungsi BPBD Kota Padang dalam penanggulangan bencana di Kota Padang. Dalam hal ini BPBD Kota Padang memiliki misi yaitu “Menciptakan masyarakat yang sadar, peduli, dan tangguh terhadap bencana”. Sebagai langkah dalam mewujudkan tujuan BPBD Kota Padang, maka dirumuskanlah strategi untuk mencapai tujuan penanggulangan bencana yaitu menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana dan terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Adapun strategi yang dijalankan oleh BPBD Kota Padang sesuai yang tercantum dalam Rencana Strategi (Renstra) BPBD Kota Padang Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut¹²:

1. Meningkatkan kapasitas pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam menghadapi bencana
2. Meningkatkan upaya penanggulangan bencana

¹² Rencana Strategi (Renstra) BPBD Kota Padang Tahun 2019-2024

Strategi yang dimiliki oleh BPBD Kota Padang dalam mitigasi bencana banjir ini dikembangkan kedalam beberapa program maupun kegiatan seperti pembentukan kelurahan tangguh bencana hingga meningkatkan sosialisasi secara berkala. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Kasubag Umum BPBD Kota Padang sebagai berikut:

“Saat ini kami mengembangkan strategi yang dimiliki oleh BPBD Kota Padang kedalam beberapa kegiatan dan program dalam mitigasi bencana banjir. Pada tahapan pra bencana pihak BPBD Kota Padang melaksanakan kegiatan seperti upaya pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana dan Kelompok Siaga Bencana pada setiap Kelurahan di Kota Padang sebagai langkah meminimalisir risiko bencana, serta pemberian sosialisasi kepada masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana tentang pentingnya kesadaran akan bencana.” (Wawancara dengan bapak Alfa Harryoga Darwin S.SSTP., M.A.P selaku Kasubag Umum BPBD Kota Padang pada 11/11/2024, pukul 11.35 WIB).

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa strategi yang dimiliki oleh BPBD Kota Padang dalam kegiatan mitigasi bencana banjir kemudian dikembangkan kedalam beberapa kegiatan dan program seperti upaya pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana dan Kelompok Siaga Bencana pada setiap Kelurahan di Kota Padang sebagai langkah meminimalisir risiko bencana, serta pemberian sosialisasi kepada masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana tentang pentingnya kesadaran akan bencana.

Selanjutnya, yang mempengaruhi proses manajemen strategi adalah implementasi strategi. Hal ini bisa dilihat dari realisasi program-program dan kegiatan yang sebelumnya telah dirumuskan untuk mencapai sebuah tujuan organisasi. Namun demikian, tidak semua kegiatan yang direncanakan BPBD Kota Padang telah terealisasi sepenuhnya selama pelaksanaan program. Peneliti

menemukan bahwa kesiapan masyarakat terhadap bencana masih rendah dan indeks pengetahuan Kota Padang terhadap bencana masih rendah. Hal ini dikarenakan rendahnya pengetahuan dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana banjir yang akan terjadi¹³. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi yang baik dari BPBD Kota Padang agar implementasi program yang dirumuskan dapat berjalan dengan baik. Berikut program BPBD Kota Padang tahun 2019-2024

Tabel 1.4
Program Penanggulangan Bencana BPBD Kota Padang 2019-2024

No.	Program dan Kegiatan
1.	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan
	a. Sosialisasi penanggulangan bencana b. Pelatihan Kelompok Siaga Bencana c. Pemasangan plang daerah rawan bencana d. Pembentukan dan Pelatihan Tim Reaksi Cepat (TRC) e. Adanya uji rencana kontijensi
2.	Program Kedaruratan dan Logistik
	a. Tersedianya peralatan dan perlengkapan sar b. Pemasangan peralatan Early Warning System (EWS) c. Pendataan masyarakat yang terdampak
3.	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
	a. Layanan trauma healing korban bencana b. Pelatihan dan pengkajian kebutuhan pasca bencana c. Pengawasan daerah rawan bencana

Sumber : Renstra BPBD Kota Padang 2019-2024

Terlihat dari tabel 1.4 bahwa program penanggulangan bencana BPBD Kota Padang terutama bagian pencegahan dan kesiapsiagaan terbagi menjadi beberapa program, seperti pelaksanaan sosialisasi, pelatihan KSB, pemasangan plang, pembentukan dan pelatihan TRC, serta pengujian rencana kontijensi. Program ini dijalankan untuk langkah awal mencapai strategi serta meningkatkan kualitas penanggulangan bencana di Kota Padang.

¹³ Ibid.hlm 46

Akan tetapi, program BPBD Kota Padang masih belum berjalan secara maksimal karena rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dimiliki BPBD Kota Padang. Selain itu, hal ini juga menyebabkan pelatihan Kelompok Siaga Bencana (KSB) tidak berjalan secara maksimal. Keterbatasan anggaran dan kurangnya sumber daya manusia juga menyulitkan sosialisasi yang efektif kepada masyarakat di daerah rawan bencana tentang pentingnya kesadaran akan bencana, yang menyebabkan Indikator Ketahanan Daerah (IKD) dan tingkat kesiapsiagaan masyarakat secara keseluruhan tetap rendah. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Seksi Kesiapsiagaan BPBD Kota Padang sebagai berikut:

“seperti yang kami jelaskan tadi, kurangnya SDM secara kuantitas maupun kualitas sangat mempengaruhi jalannya kegiatan ataupun program yang kami rencanakan. Jika terkait anggaran pasti kami kekurangan, ini kami rasakan pada saat melakukan upaya peningkatan kapasitas KSB. (wawancara dengan Seksi Kesiapsiagaan Djuliusrin, SH pada 17/10/2024, pukul 10.25 WIB).

Berdasarkan wawancara tersebut, dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa keterbatasan anggaran menjadi hambatan utama dalam implementasi strategi peningkatan kapasitas Kawasan Siaga Bencana (KSB). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara sumber daya yang tersedia baik SDM maupun anggaran yang dimiliki dengan kebutuhan strategis organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk itu diperlukan adanya strategi yang baik dan mumpuni dari BPBD Kota Padang sendiri agar dalam pelaksanaan program ini dapat berjalan dengan baik dan dapat berhasil.

Selain itu, evaluasi dan pengendalian juga merupakan faktor penting dalam proses manajemen strategis, menurut J. David Hunger dan Thomas L.

Wheelen. Proses mengukur kinerja organisasi atau lebih spesifik lagi, proses mengukur apa yang mampu dihasilkan atau dicapai oleh organisasi, dikenal dengan istilah evaluasi dan pengendalian. Hal ini berarti membandingkan kinerja BPBD Kota Padang dengan hasil yang diinginkan oleh BPBD Kota Padang.

Pengukuran strategi yang dilakukan oleh BPBD Kota Padang selama proses implementasi untuk menentukan apa yang berhasil dan tidak berhasil dalam penanggulangan bencana di Kota Padang merupakan bagian dari proses pelaksanaan evaluasi dan pengendalian. Penilaian kinerja dilakukan pada saat terjadi bencana untuk mengukur dampak dari strategi yang diterapkan dalam penanggulangan bencana di Kota Padang. Namun, BPBD Kota Padang belum dapat memenuhi target kinerja seefektif mungkin selama proses pelaksanaan, hal ini terlihat dari pencapaian target kinerja BPBD Kota Padang yang dilaksanakan belum memenuhi target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sesuai dengan observasi awal, peneliti menemukan sejumlah masalah yang dihadapi BPBD Kota Padang dalam menjalankan programnya, yang dibuktikan dengan minimnya anggaran dan sumber daya manusia yang terampil, Secara keseluruhan, peneliti menemukan bahwa program-program yang tidak berjalan tersebut berkaitan dengan pelatihan yang seharusnya menjadi tanggung jawab BPBD Kota Padang kepada masyarakat, aparatur, dan Kelompok Siaga Bencana Kota Padang masih belum berjalan dengan maksimal, sehingga jika dilihat dari misi Kota Padang bersama BPBD tentang “Menciptakan Masyarakat yang Sadar, Peduli, dan Tangguh Bencana” masih belum terealisasi secara optimal.

Jadi, untuk mengetahui bagaimana manajemen strategi dalam mitigasi bencana banjir oleh BPBD Kota Padang ini, peneliti menggunakan teori manajemen strategi oleh J. David Hunger dan Thomas L. Wheelen. Alasan di balik hal ini adalah karena fenomena teoritis yang ditemukan oleh peneliti sejalan dengan ide manajemen strategis yang dikemukakan oleh J. David Hunger dan Thomas L. Wheelen. Peneliti juga berasumsi bahwa manajemen strategis yang baik diperlukan dalam merumuskan dan melaksanakan strategi, serta untuk penilaian selama proses implementasi yang dilakukan oleh BPBD Kota Padang dalam mengurangi risiko bencana banjir di Kota Padang sehingga dapat membantu serta mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh pihak BPBD Kota Padang. berdasarkan fenomena tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana **“Manajemen Strategi dalam Mitigasi Bencana Banjir oleh BPBD Kota Padang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah: **“Bagaimana Manajemen Strategi dalam Mitigasi Bencana Banjir oleh BPBD Kota Padang?”**

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis serta mendeskripsikan Manajemen Strategi dalam Mitigasi Bencana Banjir oleh BPBD Kota Padang

1.4 Manfaat Penelitian

Selaras dengan tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya maka penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut ini:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini berguna dalam memberikan kontribusi pada pengembangan keilmuan administrasi publik, karena penelitian ini mencakup beberapa kajian Administrasi Publik di konsentrasi manajemen publik khususnya tentang manajemen strategi. Dengan demikian, peneliti berharap bisa memberikan pengetahuan tambahan serta wawasan kepada mahasiswa Administrasi Publik lainnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa membantu semua pihak, khususnya bagi BPBD Kota Padang dalam meningkatkan manajemen strategi dalam mitigasi bencana banjir di Kota Padang. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan masukan dan acuan terhadap upaya mengurangi risiko bencana kepada Pemerintah Daerah Kota Padang dalam mitigasi bencana banjir.